



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021 - 5711144 (*Hunting*)

Laman : [www.kemdikbud.go.id](http://www.kemdikbud.go.id)

Kepada Yth : Bapak Ainun Na'im  
Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Tanggal : 12-13 Februari 2015  
Dari : Ananto Kusuma Seta  
Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri  
Hal : Laporan Review KPJM dan Strukturisasi Anggaran Kemendikbud  
Tahun 2015  
Lokasi Tugas : Ruang 702 Lantai 7 Gedung C Kemendikbud

Terkait Strukturisasi Anggaran dan Penyusunan KPJM Kemendikbud, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri telah melakukan review terhadap anggaran masing-masing unit utama. Adapun hal-hal yang direkomendasikan dari review ini adalah :

## A. REKOMENDASI KHUSUS

### I. Dikdasmen

1. Fungsi Direktorat PKLK pada Ditjen Dikdasmen dipertahankan dalam OTK Kemendikbud yang baru dengan pertimbangan :
  - a. Merupakan kegiatan prioritas Nasional yang harus ditangani oleh satker Khusus (PKLK)
  - b. Lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan pendidikan layanan khusus
  - c. Mempermudah proses revisi anggaran dari OTK lama ke OTK baru karena referensi pengelolaan pendidikan layanan khusus tidak berubah
2. Perlu dilakukan efisiensi anggaran manajemen penggabungan Direktorat PKLK Dikdas dan Dikmen
3. Perlu dilakukan efisiensi anggaran manajemen penggabungan Setditjen Dikdas dan Dikmen
4. Hasil efisiensi penggabungan dimanfaatkan untuk meningkatkan akses di kabupaten yang belum tuntas wajar 9 tahun, mempercepat pencapaian SPM, dan melaksanakan wajar 12 tahun

### II. PAUD Dikmas

1. Pemenuhan anggaran untuk Direktorat Pendidikan Keluarga akan dipenuhi dari internal Ditjen PAUD Dikmas, tanpa mengurangi target sasaran prioritas RPJMN.

2. Kekurangan anggaran untuk pencapaian target RPJMN pada Direktorat Pendidikan Keluarga akan dipenuhi secara bertahap.
3. Anggaran pendidikan kesetaraan dari Dikdas dan Dikmen dialihkan ke Ditjen PAUD Dikmas. Ada komponen kegiatan yang tetap dilaksanakan di Dikdasmen, antara lain SMP terbuka dan Lomojari.

### III. Guru dan Tendik

1. Pemetaan anggaran Pusbangprodik (Rp31,7M) ditempatkan pada direktorat terkait (GTK PAUD Dikmas, Guru Dikdas, Guru Dikmen) berdasarkan bidang yang ada pada Pusbangprodik, sedangkan anggaran di TU dipindahkan di Setditjen Guru.
2. Pemetaan anggaran Direktorat Tendik berasal dari :
  - a. Pusbangtendik (anggaran kepala sekolah, pengawas, dan tendik lainnya; anggaran Pusbangtendik yang terkait dengan Diklat pegawai dipindahkan ke pusdiklat pegawai di Setjen)
  - b. Dari Direktorat P2TK Dikdas dan P2TK Dikmen tentang KS, PS, dan tendik lainnya.
3. LPMP dan PPMP dipindahkan ke Setjen. PPMP sebagai pembina teknis LPMP, diusulkan untuk dimasukan ke dalam OTK Setjen Kemdikbud yang baru mengacu pada Perpres No 7 tahun 2015 pasal 21-26.
4. Anggaran PTK (tutor dan penilik) dari Direktorat SD, SMP, SMA, SMK di relokasi ke Direktorat GTK Paud Dikmas.
5. Semua anggaran P4TK, LPPKS, dan LP3TKKPTIK dari Badan PSDMPK & PMP masuk ke Ditjen Guru
6. Rasionalisasi fungsi managemen di Direktorat Guru Dikdas, Dikmen, dan PAUD Dikmas yang berasal dari Dit P2TK PAUD, P2TK Dikdas, P2TK Dikmen yang terkait dengan fungsi koordinasi di tempatkan di Setditjen Guru dan Tendik.
7. Anggaran P2TK PAUD, Dikdas, dan Dikmen yang direlokasi ke Ditjen Guru sudah termasuk dana Dekon.
8. Kegiatan ProDep tetap di Ditjen Guru(Direktorat Tendik) sehingga semua anggaran hibah yang ada di LPMP di kembalikan ke Direktorat Tendik.
9. Anggaran Guru Bantu pada PTK PAUD, Dikdas, Dikmen tahun 2015 (Rp60,7M) ikut dipindahkan pada Ditjen Guru dan Tendik. Perlu meninjau kembali Permendikbud No 141 Tahun 2014 untuk penganggaran tahun 2016 dst.

### IV. Inspektorat Jenderal

- Anggaran untuk fungsi pengawasan pendidikan tinggi direlokasi untuk menambah sasaran audit pada inspektorat bidang lainnya.

V. Bahasa

- Segera melengkapi pemetaan output yang mendukung IKK dan IKP untuk penyusunan Renstra BPP Bahasa sesuai dengan RPJMN (Perpres 2 Th 2015) paling lambat Senin, 16 Februari 2015.

VI. Kebudayaan

1. Output dari kegiatan Pusbang SDM Kebudayaan diintegrasikan ke dalam kegiatan masing-masing direktorat yang mengampu SDM Kebudayaan beserta anggarannya.
2. Anggaran Pusat Perfilman Indonesia pada APBN-P 2015 masih di tempatkan pada DitjenBud sampai OTK baru Setjen.
3. Indikator Kinerja Pengembangan perfilman pada RPJMN dipindahkan ke OTK baru Setjen.
4. IKK dan Anggaran LSF masuk ke dalam Pusat Perfilman Indonesia pada Setjen .
5. Pusat Arkeologi Nasional diusulkan untuk menjadi pusat sendiri dengan UPT Balai Arkeologi.
6. Pusat Penelitian Kebijakan digabung dengan Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kebudayaan menjadi Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan

VII. Sekretariat Jenderal

1. Anggaran Pusbangtendik yang terkait dengan Diklat pegawai dipindahkan ke pusdiklat pegawai pada Setjen, anggaran kepala sekolah, pengawas, dan tendik lainnya tetap pada Ditjen Guru dan Tendik.
2. Anggaran PPMP dipindahkan ke Setjen untuk memenuhi kebutuhan anggaran satker baru Pusaka Setjen (Rp50M).
3. Indikator Kinerja Pengembangan perfilman pada RPJMN dipindahkan ke OTK baru Setjen, serta IKK dan Anggaran LSF masuk ke dalam Pusat Perfilman Indonesia pada Setjen .
4. Anggaran Pusat Perfilman Indonesia pada APBN-P 2015 masih di tempatkan pada DitjenBud sampai OTK baru Setjen ditetapkan.
5. Penyesuaian tusi dan anggaran biro dan pusat menyesuaikan nomenklatur baru di lingkungan Setjen:
  - a. Biro Perencanaan Dan Keuangan.
  - b. Biro Kerjasama Dan Humas.
  - c. Pusdiklat pegawai
  - d. Pusat Analisis Dan Kebijakan (Pusaka)
  - e. Pusat Komunikasi Publik
  - f. Pusat Perfilman

B. Rekomendasi Umum

1. Melakukan pemetaan output yang mendukung IKK dan IKP guna mendraft Renstra dari OTK lama ke dalam OTK baru.
2. Penanggung jawab program diminta melakukan pemetaan output "semula menjadi" dari OTK lama ke OTK baru.
3. Penanggung jawab program diminta mengusulkan Nomenklatur program, kegiatan, dan output baru sebagai bahan pengusulan referensi ke DJA untuk penyusunan RKAKL sesuai dengan OTK Kemendikbud yang baru.

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.



Tembusan :

1. Pimpinan Unit Utama
2. Staf khusus Kemendikbud
3. Biro Hukum dan Organisasi



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon: 021 - 5711144 (*Hunting*)

Laman: [www.kemdiknas.go.id](http://www.kemdiknas.go.id)

## REKOMENDASI

Rapat Review KPJM Program Pelestarian Budaya Tahun 2015-2019 pada tanggal 13 Februari 2015 di Ruang Sidang Gedung C Lantai 7, Kemendikbud merekomendasikan.

1. Output dari kegiatan Pusat Pengembangan SDM Kebudayaan akan diintegrasikan ke dalam kegiatan masing-masing direktorat yang mengampu SDM Kebudayaan beserta anggarannya.
2. Anggaran Pusat Perfilman Indonesia pada APBN-P 2015 masih ditempatkan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan sampai OTK Kemendikbud baru terbentuk.
3. Indikator Kinerja Pengembangan Perfilman pada RPJMN akan dipindahkan ke Sekretariat Jenderal.
4. IKK dan Anggaran Lembaga Sensor Film masuk ke dalam Pusat Perfilman Indonesia pada Sekretariat Jenderal.
5. Penanggung jawab Program Penelitian Pelestarian Budaya segera melakukan pemetaan output "semula-menjadi" dari OTK Lama ke OTK Baru.
6. Penanggung jawab Program Pelestarian Budaya segera mengusulkan Nomenklatur Program, Kegiatan, dan Output baru sebagai bahan pengusulan referensi aplikasi RKA-K/L ke DJA mengacu pada OTK Kemendikbud yang baru.

Jakarta, 13 Februari 2015

1. Ahmad Rizali  
(Staf Khusus Menteri)

2. Winarni  
(Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran,  
Ditjen Kebudayaan)

3. Gogot Suharwoto  
(Kepala Bagian Perencanaan Program dan  
Anggaran, Biro PKLN)